

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem demokrasi telah dianut oleh banyak negara, diantaranya Indonesia. Pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia diwujudkan melalui salah satunya pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sarana pelaksanaan pada kedaulatan rakyat untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dapat terwujud melalui pilkada. Hal ini sudah dituliskan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang dimana gubernur sebagai kepala pemerintah provinsi, bupati sebagai kepala pemerintah kabupaten, dan walikota sebagai kepala pemerintah kotamadya, masing-masing dipilih secara demokratis. Lembaga Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan melalui pemilihan umum bahwa masa jabatan kepala pemerintah daerah seperti gubernur, bupati dan walikota adalah 5 tahun.

Pada tahun 2015 undang-undang pilkada telah disahkan secara resmi oleh pemerintah. Pengesahan undang-undang tercantum pada UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa setiap lima tahun sekali diadakan pemilihan gubernur, walikota, dan bupati secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pernah diselenggarakan secara bertahap pilkada serentak untuk tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2017 dilaksanakan pilkada tahap kedua untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan yang berakhir pada 2017. Pada bulan Juni 2018 secara serentak dilaksanakan pilkada serentak gelombang ketiga. Pemilihan kepala daerah secara rutin dan bertahap menjadi agenda nasional yang terselenggara dalam batas waktu lima tahun sekali (Achmad, 2015).

Perwujudan dari kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan kepala daerah dimana sebagai salah satu bentuk dari partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat menjadi pihak yang paling penting dalam menentukan proses politik pada saat melakukan pemilihan kepala daerah di

wilayahnya yaitu dengan cara masyarakat memberikan suara secara langsung guna mendapatkan suatu sosok pemimpin yang tepat dan layak. Pemimpin yang terpilih nantinya bertugas untuk mengarahkan dan memajukan wilayah yang akan dipimpin tersebut. Sebagai tolak ukur dalam menilai partisipasi masyarakat pada daerah tersebut ditunjukkan melalui hasil dari pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan dalam suasana terbuka, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat. Teori *Activist Rationality* memaparkan bahwa kualitas yang baik pelaksanaan demokrasi di suatu negara dengan ditunjukkannya dengan banyaknya animo warga negara dan masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam suatu aktivitas politik (Ida, 2012).

Sudah menjadi hal umum di kalangan masyarakat bahwa persaingan pemilihan masing-masing kepala daerah dari kandidat bakal calon pemimpin yang bersaing untuk memperoleh kemenangan dari perolehan pemungutan suara saat pemilihan pilkada berlangsung. Segala macam upaya akan digunakan para kandidat untuk menarik perhatian dari masyarakat agar dapat dipilih oleh masyarakat tersebut. Para calon kandidat pemimpin menyampaikan visi misi dan program kerja dengan tujuan agar dapat memperoleh banyak dukungan dari masyarakat. Kegiatan pemilihan pilkada merupakan salah satu bagian dari suatu proses komunikasi politik yang dijalankan kepada masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat turut terlibat langsung dalam memberikan hak suaranya melalui pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan terlaksananya saluran komunikasi politik yang efektif.

Salah satu cara yang efektif dan penting dalam membangun suatu citra politik, sebagai contoh para calon kandidat pemimpin yang melakukan suatu kampanye adalah melalui komunikasi politik. Komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat adalah melalui kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye atau partai politik. Para kandidat kepala daerah yang memperoleh respon dari masyarakat sehingga akhirnya terpilih dalam suatu pemilihan umum diperlukan suatu kampanye politik. Kampanye politik dapat diwujudkan dalam bentuk aplikasi komunikasi politik organisasi politik,

sekelompok orang, atau individu sehingga terbentuk dan terbina citra dan opini publik yang positif (Arifin, 2015).

Hal yang paling penting dalam kampanye politik adalah bagaimana tersampainya informasi atau pesan tentang kegiatan kampanye oleh para calon kandidat pemimpin kepada masyarakat. Media massa seperti televisi, baliho, atau media sosial, seperti *instagram*, *facebook*, dan *twitter* merupakan aplikasi dalam proses pemberitaan kegiatan kampanye tersebut.

Platform media massa merupakan saluran komunikasi yang paling sering digunakan calon kandidat pemimpin dalam melakukan suatu kampanye politik. Media massa dipandang efektif dapat menyebarkan suatu informasi kepada masyarakat secara masif atau luas. Oleh karena itu media massa menjadi suatu elemen yang paling penting dalam melakukan suatu proses komunikasi politik karena tanpa media massa pesan politik yang ingin disampaikan dalam kampanye politik tidak mampu menggapai banyak masyarakat secara luas dan cepat. Maka dari itu, calon kandidat atau partai politik harus menggunakan dan memanfaatkan media masa untuk mendapatkan dukungan dari banyak orang atau masyarakat. Melalui media massa pelaksanaan komunikasi politik secara pasti mampu memengaruhi tindakan dan pemikiran masyarakat sehingga terbentuknya suatu opini publik terhadap komunikatornya.

Masyarakat biasanya sangat bergantung pada media massa sebagai sumber informasi. Media massa saat ini berkembang sangat pesat, memberikan kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat untuk menggunakan berbagai media massa. Media massa digunakan calon kandidat pemimpin dan tim pemenangan masing-masing kandidat sebagai taktik kampanye dalam berbagai cara, termasuk iklan televisi, baliho, dan *platform* media sosial seperti *instagram*, *facebook*, dan *twitter*.

Media massa seperti televisi, baliho dan media sosial merupakan saluran komunikasi politik yang paling dekat dengan masyarakat. Dari saluran komunikasi tersebut telah menjadi suatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai macam informasi yang berkaitan dengan para calon

kandidat pemimpin, seperti profil, latar belakang, dan visi misi dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat melalui saluran komunikasi tersebut. Berbagai aktivitas para calon kandidat pemimpin dapat dilihat oleh masyarakat melalui aneka macam media massa, diantaranya dengan media televisi yang menayangkan debat pilkada atau *talk show* antar para calon tokoh politik atau kandidat pemimpin. Melalui tayangan tersebut diharapkan masyarakat menilai dan memberikan tanggapan terhadap calon kandidat pemimpin dalam pilkada. Contoh yang lain seperti melihat di media sosial atau baliho dan poster mengenai detail dari visi misi yang akan ditampilkan calon kandidat.

Penyebaran pesan-pesan politik dapat menjangkau sasaran terhadap banyak orang dan sangat luas melalui pemanfaatan media massa. Menurut pendapat Hesnessy dalam (Annas & Petranto & Pramayoga, 2019) bahwa peran media massa sangat penting dalam menyampaikan siaran, informasi, dan tayangan yang jelas, akurat dan benar. Dengan adanya peran tersebut media massa mampu memberi atau menyediakan kebutuhan informasi kepada masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa para calon kandidat pemimpin daerah diperbolehkan melakukan pemberitaan kampanye melalui saluran media massa. Aktivitas kampanye melalui pemberitaan media massa hendaknya berprinsip pada azas faktual, tidak provokatif, adil dan berimbang, dan menghindari unsur SARA.

Salah satu daerah yang mengikuti pilkada secara serentak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah Kelurahan Cinere. Adapun pelaksanaannya adalah 13 Desember 2020. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan pada Desember 2020 tersebut diikuti sebanyak dua kandidat Walikota dan Wakil Walikota Depok, yaitu antara lain: H. Pradi Supriatna berpasangan dengan Hj. Afifah Alia, S. T; dan Mohammad Idris berpasangan dengan Ir. Imam Budi Hartono. Dan dalam pilkada 2020 tersebut telah di menangkan oleh Mohammad Idris berpasangan dengan Ir. Imam Budi Hartono yang sekarang sudah menjadi Walikota dan Wakil Walikota Depok.

Data tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mencatat bahwa rekor tertinggi partisipasi warga di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok meskipun di tengah adanya pandemi Covid-19. Nana Shobarna selaku Ketua KPU Kota Depok memaparkan bahwa angka partisipasi pemilih di Pilkada Kota Depok tahun 2020 mencapai 62,79 persen atau naik 6,64 persen dari pilkada sebelumnya pada tahun 2015 yaitu hanya sebesar 56,15 persen. (Indonesia, 2020). Di dalam Kelurahan Cinere sendiri yang berada dalam naungan Kota Depok, KPU Depok mendata bahwa partisipasi masyarakat yang ada di kelurahan Cinere memiliki jumlah partisipasi masyarakat yang paling tinggi diantara kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Cinere.

Berikut data perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam Walikota Depok 2020 antara Kelurahan Cinere, Gandul, Pangkalan Jati, dan Pangkalan Jati Baru.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Partisipasi Masyarakat Kelurahan Cinere

Kelurahan	Jumlah Partisipasi
<u>Cinere</u>	<u>43.350</u>
<u>Gandul</u>	<u>26.009</u>
<u>Pangkalan Jati</u>	<u>16.427</u>
<u>Pangkalan Jati Baru</u>	<u>6.122</u>

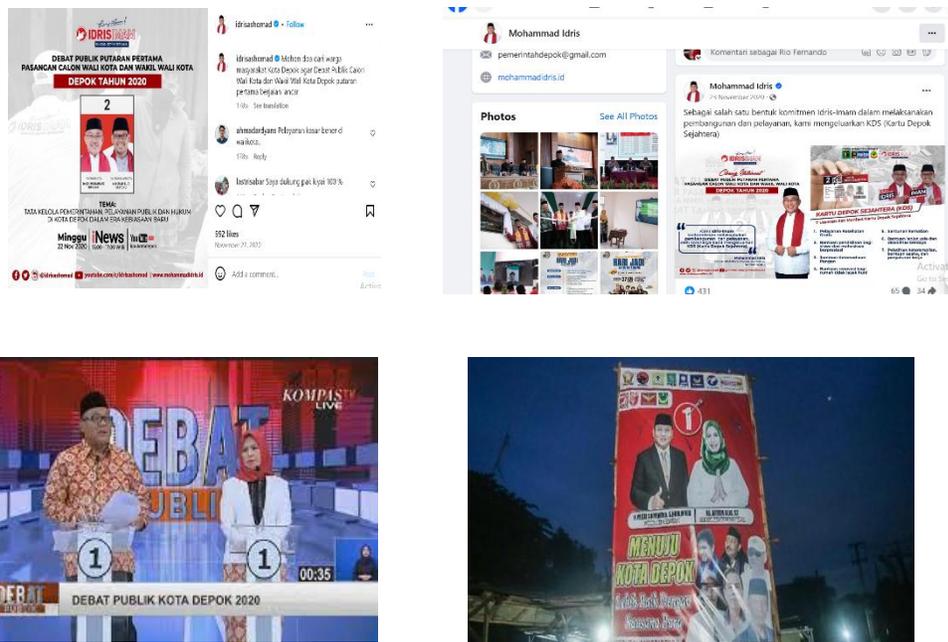
Sumber: KPU Kota Depok

Oleh karena data pada tabel 1.1 diatas tersebut peneliti tertarik untuk memilih Kelurahan Cinere karena Kelurahan Cinere ini memiliki jumlah partisipan yang tertinggi diantara kelurahan-kelurahan lainnya. Dan peneliti juga ingin meneliti bahwa saluran komunikasi politik apakah diantara yang peneliti sebutkan sebelumnya seperti baliho, acara televisi, dan media sosial instagram, twitter dan facebook di daerah Kelurahan Cinere tersebut yang membuat masyarakat Kelurahan Cinere lebih berminat atau tertarik untuk

melakukan suatu partisipasi politik seperti mengikuti kampanye politik, diskusi politik dan atau cukup menggunakan hak suara mereka di TPS. Peneliti ingin mengetahui saluran komunikasi yang dominan karena pada tahun 2020 tersebut sedang ada terjadinya pandemi Covid-19, yang dimana masyarakat dipaksa atau terpaksa lebih bergantung kepada media sosial untuk mencari tahu informasi-informasi karena dengan adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Oleh karena itu peneliti ingin mencari tahu apakah masyarakat di Kelurahan Cinere dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota mencari informasi dari media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter atau masih dengan melihat di televisi seperti iklan dan debat kampanye atau juga dengan melihat baliho calon kandidat. Peneliti juga ingin apakah ada pengaruh dalam saluran komunikasi politik yang digunakan masyarakat dalam partisipasi masyarakat Kelurahan Cinere terhadap pemilihan kepala daerah tersebut.

Berikut contoh-contoh kampanye dengan menggunakan beberapa saluran komunikasi politik yang dilakukan oleh calon kandidat Walikota dan Wakil Walikota Depok:

Gambar 1. 1 Saluran Komunikasi Politik Kampanye



Tabel 1. 2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 Per TPS Di Kelurahan Cinere

TPS	Jumlah Partisipasi
TPS 1	217
TPS 2	126
TPS 3	85
TPS 4	189
TPS 5	117
TPS 6	81
TPS 7	234
TPS 8	216
TPS 9	125
TPS 10	76
TPS 11	161
TPS 12	123
TPS 13	167
TPS 14	209
TPS 15	95
TPS 16	150
TPS 17	65
TPS 18	174
TPS 19	157
TPS 20	120
TPS 21	109
TPS 22	211
TPS 23	180
TPS 24	248
TPS 25	206
TPS 26	172
TPS 27	143
TPS 28	108
TPS 29	214
TPS 30	201
TPS 31	175
TPS 32	172
TPS 33	57
TPS 34	131

TPS 35	74
TPS 36	119
TPS 37	60
TPS 38	121
TPS 39	245
TPS 40	123
TPS 41	225
TPS 42	212
TPS 43	176
TPS 44	150
TPS 45	171
TPS 46	121
TPS 47	128
TPS 48	116
TPS 49	94
TPS 50	98
TPS 51	120
TPS 52	105
TPS 53	106
TPS 54	51
TPS 55	139
TPS 56	152
TPS 57	106
TPS 58	107
TPS 59	199
TPS 60	153
TPS 61	200
TPS 62	161
TPS 63	87
TPS 64	113
TPS 65	91
TPS 66	86
TPS 67	76
TPS 68	64
TPS 69	102
TPS 70	88
TPS 71	82
TPS 72	82
TPS 73	83
TPS 74	99
TPS 75	50
TPS 76	107
TPS 77	152

TPS 78	90
TPS 79	106
TPS 80	122

Sumber: KPU Kota Depok

Berdasarkan dari tabel data yang telah disampaikan, peneliti memilih Kelurahan Cinere lebih tepatnya di TPS 24 karena disana menjadi tempat yang terbanyak tingkat partisipasi masyarakatnya dalam melakukan pemilihan kepala daerah, yaitu sebanyak 248 partisipan.

Sebagai tolak ukur dalam penelitian, peneliti akan mengkaji beberapa karya ilmiah yang mempunyai tema yang relevan supaya memperdalam topik penelitian. Peneliti menggunakan literature yang terdapat di buku, jurnal-jurnal, laporan penelitian, serta sumber elektronik. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan jurnal, dan artikel yang tentunya terdapat relevansi dengan penelitian penulis dan menghubungkan beberapa literatur yang telah dibuat.

Peneliti terdahulu pertama yang ditulis oleh Magrifah pada tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Komunikasi Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur di Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Kota Makasar.” Hasil penelitian ini menunjukkan data bahwa komunikasi politik sangat memiliki pengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan gubernur tahun 2018 di Kota Makassar sebesar 35 persen (%). Komunikasi politik yang dilakukan di kota Makassar dilaksanakan melalui saluran atau media massa antara lain: internet, surat kabar dan televisi. Media massa yang menjadi paling dominan yaitu penggunaan televisi. Hal ini dikarenakan masyarakat Makassar lebih tertarik untuk menonton debat para calon kandidat sehingga masyarakat dapat melihat dengan mudah karakteristik dan kualitas dari calon kandidat gubernur tersebut.

Peneliti terdahulu kedua yang ditulis oleh Fauzi pada tahun 2018 yang berjudul “Komunikasi Politik Calon Legislatif dalam Memengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara.” Penelitian ini memaparkan bahwa dengan adanya komunikasi politik secara signifikan memengaruhi

partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Aceh Utara sebesar 33,2 persen. Pesan-pesan politik yang disampaikan pada saat kampanye secara langsung maupun melalui media massa merupakan penentu keberhasilan proses kampanye peserta pemilu. Pendidikan politik penting diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Pendidikan politik dimaknai penting sebagai suatu gerakan yang berkelanjutan, sehingga perlu adanya rancangan metode pendidikan politik yang berkesinambungan terhadap masyarakat. Dengan adanya pendidikan politik ini akan membangun masyarakat yang semakin peduli terhadap politik dan mengetahui seberapa pentingnya pemilu dalam sistem politik demokrasi.

Peneliti terdahulu ketiga yang ditulis oleh Ayuni Nur Fatwa pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Bupati Tahun 2013 di desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara.” Penelitian ini memaparkan bahwa kesadaran politik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi politik di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 13,1 persen (%). Data lain menunjukkan bahwa variabel kesadaran politik dan variabel partisipasi politik juga dipengaruhi oleh faktor lainnya sebesar 86,9 persen (%).

Peneliti terdahulu keempat yang ditulis oleh Andy Ilman Hakim pada tahun 2014 yang berjudul “Komunikasi Politik Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur (Studi Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tahun 2013.” Penelitian ini menunjukkan data bahwa kultur sosial keagamaan Muslimat NU sebagai kaum nahdliyin dan iklim Muslimat NU yang berbasis keluarga melatarbelakangi proses dari komunikasi politik. Kekuatan budaya organisasi Muslimat NU juga menjadi kekuatan politik yang berdampak positif pada proses penyebaran dan penerimaan pesan-pesan komunikasi politik. Kekuatan budaya organisasi juga mampu mempengaruhi pergerakan khalayak dalam proses partisipasi politik. Disamping itu ikatan emosional antar sesama muslimat juga menjadi bangunan kesolidan dalam bergerak bersama berdasarkan kebenaran yang diyakininya.

Peneliti terdahulu kelima yang ditulis oleh Aditya Putra pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Strategis Komunikasi Partai Politik Baru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemula (Studi Kasus DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare).” Penelitian ini memaparkan bahwa dengan berbagai macam saluran komunikasi yang digunakan bukan berarti hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi politik dengan signifikan jika tanpa adanya pengalaman seperti di studi kasus yang dialami Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare. Partai politik tersebut mengalami kendala dalam pelaksanaan strategi komunikasi politik. PSI Kota Parepare ini menggunakan saluran komunikasi berupa media konvensional seperti televisi, majalah, surat kabar, dan media *online* (media sosial ataupun jejaring pertemanan). PSI juga memanfaatkan atribut seperti bendera, kaos, baju, dan lain sebagainya untuk penyebaran pesan politik dan media kampanye politik. Namun pada kenyataannya pengalaman politik yang terbatas pada anggotanya, tidak berfungsinya pendidikan politik partai, dan perbuatan oknum tertentu mempengaruhi minimnya suara yang diperoleh PSI Kota Parepare. Kondisi tersebut terjadi karena pengurus maupun bacaleg PSI Kota Parepare sepenuhnya terdiri dari para anak muda. Meskipun demikian PSI Kota Parepare ini dapat dikatakan cukup berhasil dalam upaya mendorong keterlibatan anak muda dan pemilih pemula dalam proses politik.

Peneliti terdahulu keenam yang ditulis oleh Yanes Petrus Sarwa, Nur Hidayat, dan Hermanto Suaib pada tahun 2017 yang berjudul “Peranan Komunikasi terhadap Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Kelurahan Waisai Kabupaten Raja Ampat).” Penelitian ini memaparkan peranan komunikasi politik berlangsung efektif dalam rangka proses partisipasi politik masyarakat Kelurahan Waisai. Kondisi ini didukung oleh adanya proses partisipasi politik pada pemilihan seorang pemimpin dan badan politik lainnya. Proses komunikasi politik berjalan efektif dikarenakan adanya dukungan dari media komunikasi yang tersedia. Proses penyampaian pesan politik pun berjalan lancar dan simpatisan tertarik ikut berpartisipasi dalam pemilihan.

Peneliti terdahulu ketujuh yang ditulis oleh Nia Sarinastiti dan Petty S. Fatimah pada tahun 2019 yang berjudul “Edukasi Komunikasi Politik dalam Menciptakan Kesadaran dan Minat Pemilih Perempuan.” Penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan informasi dan kegiatan yang ditampilkan melalui media massa seperti media *online*, sosial, dan televisi sebagai bentuk sosialisasi para calon kandidat memberikan persepsi yang baik bagi calon pemilih. Ketiga saluran tersebut menentukan preferensi untuk proses pemilihan. Kemudian terbentuk juga pemahaman pemilih terhadap karakteristik calon kandidat dalam menentukan informasi program relevan yang akan disampaikan, tidak hanya sekedar berdasarkan budaya dan agama semata.

Peneliti terdahulu kedelapan yang ditulis oleh Alfian Bachtiar pada tahun 2022 yang berjudul “Strategi Komunikasi Politik PDI-P Menjelang Pemilu 2024 di Masa Pandemi COVID-19: Refleksi Partisipasi Politik Masyarakat di Era Modern dalam Mewujudkan Demokrasi.” Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menghadapi pemilu 2024, PDI-P menggunakan strategi politik yang bercorak persatuan dan gotong royong untuk menyaingi lawan politik dan opini publik pada masa pandemi Covid-19 dengan melalui penyebaran baliho Puan Maharani secara masif. PDI-P juga menggunakan kelompok kepentingan untuk membangun narasi positif di masyarakat terhadap setiap kebijakan dan program yang diambil oleh PDI-P. Karena kedua hal tersebut terbukti berdampak signifikan menaikkan elektabilitas Puan Maharani yang pada awalnya bahkan tidak masuk ke dalam daftar calon Presiden yang diharapkan rakyat.

Peneliti terdahulu kesembilan yang ditulis oleh Devianti Angraini, Aang Wahyu Ariesta, dan A.G Eka Wenats Wuryanta pada tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Instagram Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pemilihan Umum Presiden RI.” Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang cukup positif signifikan dari penggunaan media sosial Instagram terhadap tingkat partisipasi politik remaja. Meskipun pengaruh yang diberikan oleh media sosial Instagram tidak begitu besar terhadap remaja,

namun penggunaan media sosial dapat bermanfaat bagi para calon kandidat pemimpin dalam upaya untuk menggiring sikap dan opini masyarakat dalam berkontribusi dan berpihak kepada individu melalui kampanye dan program-program lain di media sosial instagram tersebut.

Peneliti terdahulu kesepuluh yang ditulis oleh Anna Gustina Zainal, dan Sarwititi Sarwoprasodjo pada tahun 2018 yang berjudul “Strategi Komunikasi Politik Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan (Studi Program “Bupati Ronda” di Kabupaten Lampung Tengah).” Penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya program yang dibuat di Kabupaten Lampung Tengah yang disebut Bupati Ronda dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang karena hal tersebut sangat membantu dalam mewujudkan *good governance* di Kabupaten Lampung Tengah. Bupati Ronda merupakan sebuah aplikasi yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan wilayah juga akan menyoar pada bidang sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan tata kota. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berhasil melakukan strategi komunikasi politik ini dengan mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang dijabarkan diatas, perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang disusun, yaitu perbedaan pertama dari cara mendapatkan hasil dari penelitian, perbedaan kedua yaitu perbedaan subjek dalam penelitian, lalu perbedaan ketiga terdapat pada lokasi dan waktu penelitian, dan perbedaan keempat yaitu dalam beberapa teori yang digunakan. Penelitian ini akan mencari tahu apakah ada pengaruh antara saluran komunikasi politik dengan partisipasi politik di Kelurahan Cinere pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, serta mencari tahu saluran komunikasi politik apa yang dominan yang digunakan masyarakat di Kelurahan Cinere.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Peneliti merumuskan permasalahan yang akan dijadikan sebagai acuan penelitian berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut. Rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh saluran komunikasi politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil walikota Depok tahun 2020 di Kelurahan Cinere?
2. Manakah variabel saluran komunikasi politik yang lebih dominan berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2020 di Kelurahan Cinere antara media televisi, baliho, dan media sosial, seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Praktis

Untuk mendeskripsikan adanya pengaruh dari saluran komunikasi politik terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2020 di Kelurahan Cinere.

1.3.2 Tujuan Teoritis

Untuk mengetahui manakah saluran komunikasi politik yang lebih dominan antara media televisi, baliho, dan media sosial seperti, *Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter* terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2020 di Kelurahan Cinere.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain adalah:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan studi ilmu politik yang menyangkut saluran komunikasi politik dan partisipasi politik.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berarti bagi UPN Veteran Jakarta.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadikan salah satu referensi dalam pengembangan penelitian berikutnya yang memiliki topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi tentang pengaruh saluran komunikasi politik terhadap partisipasi politik di masyarakat dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti mengenai saluran komunikasi politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah di UPN Veteran Jakarta.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, peneliti terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori yang digunakan dalam penelitian dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdapat paradigma penelitian, tipe penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, data hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh saluran komunikasi politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan Walikota Depok di kelurahan Cinere tahun 2020 dan saluran komunikasi manakah yang paling dominan digunakan di Kelurahan Cinere.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka terdapat kumpulan sumber literatur yang digunakan untuk penelitian ini.